

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai fokus dan sub fokus penelitian berikut ini:

1. Implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ditinjau dari:
 - a. Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan belum sepenuhnya optimal, karena walaupun tahapannya sudah mengikuti peraturan yang ada mulai dari penyusunan RPJM-Des, RKP-Des, APB-Des hingga Penetapan dan pelaksanaan Perdes APB-Des, namun dari sisi partisipasi masyarakat dalam menghadiri terkait pembahasan perencanaan pengelolaan dana desa masih kurang, selain itu terdapat masyarakat yang hadir dalam pembahasan namun cepat pulang.
 - b. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan dari segi mekanisme pencairan dana desa sudah dilakukan sesuai peraturan yang ada. Sedangkan dari segi pelaksanaan pembangunan sudah terdapat berbagai pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Namun memang dalam pelaksanaan tersebut seringkali terjadi keterlambatan dalam proses pembangunannya karena persoalan tuntutan gaji dari masyarakat sebagai pekerja, sehingga dapat dikatakan proses pelaksanaan belum terlalu optimal.

- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan, dilakukan berdasarkan peraturan yang ada dimana pemerintah desa menyiapkan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, laporan kekayaan milik desa sekaligus dengan rincian pendapatan. Akan tetapi dari sisi pelaksana kegiatan dalam membuat laporan fisik sebelum dan sesudah pekerjaan seringkali masih di bantu oleh aparat desa dalam pengerjaannya.
 - d. Pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan, telah dilakukan oleh aparat desa, BPD, lembaga terkait, masyarakat maupun pihak inspektorat dan Dinas PMD Kabupaten Gorontalo namun dari waktu pengawasan yang dilakukan masih kurang intens.
2. Faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ditinjau dari:
- a. Komunikasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan, dilakukan melalui musyawarah dusun, desa dan sosialisasi. Akan tetapi sangat disayangkan tingkat kehadiran masyarakat masih sangat kurang sehingga aparat desa juga memasang baliho di setiap dusun sehingga semua masyarakat dapat mengetahui jumlah anggaran maupun kegiatan yang ada pada satu tahun anggaran.
 - b. Sumber daya dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan, dari segi SDM, aparat desa terbilang mampu dalam mengelola proses administrasi, hanya saja dari tim pelaksana kegiatan masih mengalami

kendala karena kurang mampu dalam mengoperasikan komputer dalam membuat laporan fisik sebelum dan sesudah pekerjaan. Sedangkan dari segi sumber daya fasilitas juga masih sangat minim dalam menunjang pengelolaan dana desa.

- c. Sikap pelaksana dalam dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan belum sepenuhnya optimal, karena masih sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang seringkali tidak sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.
- d. Struktur birokrasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan belum maksimal, karena walaupun telah ada pembagian tugas dan tupoksi yang jelas berdasarkan SOP dan peraturan yang ada, tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya mampu mengelola dokumen administrasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan padahal hal tersebut merupakan tupoksi mereka.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya, Kepala Desa Dulamayo Selatan dan jajarannya melakukan komunikasi yang lebih intens dan memberikan motivasi dan dorongan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang acuh tak acuh dengan pembangunan desa untuk dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan terkait dengan pengelolaan dana desa khususnya pada tahap perencanaan. Karena dengan adanya komunikasi yang baik maka partisipasi masyarakat juga akan meningkat. Disamping itu, sumber daya fasilitas penunjang

dalam pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan kembali agar dalam pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik.

2. Sebaiknya BPD bersama masyarakat dan juga aparat desa untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan dalam pengelolaan dana desa dengan secara rutin, sehingga dalam proses pengawasan dapat berjalan dengan maksimal, karena proses pekerjaan senantiasa terkontrol dengan adanya proses pengawasan yang intens.
3. Sebaiknya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melatih kemampuannya dalam mengoperasikan peralatan komputer, sehingga dalam proses pembuatan laporan fisik sebelum dan sesudah pekerjaan dapat dilakukan oleh TPK secara mandiri. Tidak hanya itu, diharapkan para TPK untuk dapat meningkatkan komitmen dalam mengelola keuangan desa agar kedepannya pengelolaan dana desa dapat berjalan optimal sesuai dengan tupoksi yang ada pada struktur birokrasi.
4. Sebaiknya masyarakat meningkatkan sinergi dan kerjasamanya dengan para pihak aparat desa terutama bagi masyarakat yang menjadi pekerja dalam pelaksanaan pembangunan desa agar dapat bekerja dengan profesional dan tidak terlalu menuntut gaji yang tinggi karena dapat menghambat proses pembangunan yang berjalan di desa sendiri.
5. Sebaiknya bagi Dinas terkait, untuk dapat memberikan pelatihan bagi para aparat desa Dulamayo Selatan terkait dengan pengelolaan dana desa, sehingga kedepannya proses pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih optimal dengan adanya sumber daya manusia yang handal dan berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdal. 2015. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitann Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati.
- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Garrison, H. Ray; Eric W. Noreen; dan Peter C. Brewer. 2006. *Akuntansi Manajerial*, (terjemahan: A. Totok Budisantoso), Buku I, Edisi Kesebelas. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2008. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Kadji Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Kemenkeu. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu. 2017. *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mukarom Zaenal dan Laksana Muhibudin Wijaya. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Riyadi dan Bratakusumah. 2005. *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Multigrafika.
- Santoso Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Situmorang Chazali H. 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute.
- Sore Uddin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: SAH Media.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulila Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

Tahir Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik. Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Jurnal Penelitian:

Adnan Hasyim. 2018. *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*. Jurnal. Al'Adl. Vol. 8, No.2, Hal: 1-19.

Arfiansyah M. Arief. 2020. *Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah*. Jurnal Studi Islam dan Sosial. Vol. 1; No. 1; Hal: 91-106.

Baihaqi Sari R. Pelita dan Asmawanti Dri. 2017. *Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)*. Jurnal Akuntansi. Vol. 7, No.1, Hal: 61-76.

Gunawan. 2019 *Pengawasan Implementasi Dana Desa di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara*. Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan. Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri

Herlina Ade dan Hermana Dody. 2020. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Fisik Di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut*. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik. Vol. 09, No. 02, Hal: 1-8.

Hidayat, Endik. 2021. *Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang*. Soetomo Communication And Humanities Vol. 02, No. 01, Hal: 126-136.

Hulinggi Febriyanto. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Nilai Budaya Lokal Huyula Di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.

Hutami Andi S. Sri. 2017. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 10, No. 1, Hal: 10-19

Igrisa Irawaty. 2012. *Studi Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Gorontalo*. Laporan Hasil Penelitian Universitas Negeri Gorontalo.

- Kapita Mutlaben, Mingkid Elfie, Rares Joyce J. 2021. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan. Vol. 1 No 1, Hal: 27-37.
- Karimah Faizatul, Saleh Choirul, dan Wanusmawatie Ike. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2, No. 4, Hal. 597-60.
- Marjuanti Eka. 2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Airmaddidi Kabupaten Minahasa Utara*. Univeritas Klabat, Sulawesi Utara. Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Vol 1, No. 2, Hal: 293-299.
- Riadi 1 Slamet, Sawitri Anna dan Suasa. 2020. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong*. Jurnal Moderat, Vol 6. No. 3, Hal: 490-500.
- Rondonuwu, Riedel Arthur. dkk. 2020. *Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*. JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol 1. No. 3, Hal: 56-65.
- Siregar Surya Murni. *Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 di Desa Sei Tampang*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Medan Area.
- Sunardi Nardi dan Lesmana Rosa. 2020. *Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang*. Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi), Vol.3, No.3 Hal: 277-288.
- Sunu Made K. Kalpika dan Utama Made Suyana. 2019. *Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol. 8, No.8, Hal: 843-872.
- Tahir Arifin. 2012. *Analisis Implementasi Kebijakan Empat Pilar Pengembangan Universitas Negeri Gorontalo*. Jurnal Pedagogika FIP UNG.
- Tui Fenty Prihatini. 2018. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango*. Jurnal Manajemen SDM, Administrasi dan Pelayanan Publik STIA Bina Taruna Gorontalo.
- Umbara Dani, Kamaluddin Murdjani, dan Tawai Adrian. 2018. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Upaya Mewujudkan Efektivitas Program*

Pembangunan Desa di Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.
Jurnal Publica. Vol. 10, No. 1, Hal: 1-10.

Yarni Meri, Kosariza, Irwandi. 2019. *Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Jurnal Sains Sosio Humaniora. Vol. 3, No. 2, Hal: 198-205.

Undang-Undang dan Peraturan:

Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo No. 35 Tahun 2020 tentang *Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD tahun 2020.*

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 12 Tahun 2019 tentang *Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Menteri Desa PDTT No.13 Tahun 2020 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.*

Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/ Tahun 2016 tentang *Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.*

PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang *Peratursan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa.*

PP 8/2016 tentang Perubahan kedua atas PP 60/2014 tentang *Dana Desa yang bersumber dari APBN.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa.*